

Descriptive Analysis of Investment to Support Aceh's Tourism

Win Konadi^{1*}, T. M. Nur², Musrizal Musrizal¹

¹ Prodi EKP Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen - Aceh

² Prodi Agrinisis Fakultas Pertanian Universitas Almuslim Bireuen - Aceh

*Corresponding author: Win Konadi, email: winmanan1964@gmail.com

<https://doi.org/10.63855/skt.v5i2.99>

Article history

Received:

July 20, 2026

Accepted:

August 3, 2026

Published:

August 10, 2026

Page:

1 – 12

Keywords:

descriptive analysis,
investment, aceh tourism



© 2026

Oleh authors. SingKite Journal; Management, Business and Entrepreneurship. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT: The tourism sector serves as a catalyst for development of accelerating the development process, particularly in Aceh Province, which boasts beautiful mountainous and coastal landscapes. The emergence of various tourist attractions, including new tourism villages, is supported by capital investment. This is because a reciprocal relationship exists between investment and tourism development, driving economic growth and generating employment opportunities. This study employs a descriptive qualitative analysis, examining tourism potential, visitor trends, and efforts to boost investment to support economic development, specifically within the tourism sector. By analyzing data, phenomena, and reference materials, the study describes the crucial role of the local government in developing Aceh's tourism sector; regional tourism development focuses primarily on economic aspects (such as foreign exchange and tax revenue) and social (such as job creation). Trends in tourism and investment are on the rise, driven by security guarantees for investors and strong tourist interest in visiting Aceh. Local governments in regions that implement Sharia law need to adopt creative strategies and innovations tailored to their specific contexts. Furthermore, the development of the tourism industry as a component of the economic and business landscape - requires a long-term plan.

ABSTRAK: Sektor pariwisata merupakan katalisator pembangunan yang dapat mengakselerasi proses pembangunan, khususnya di Provinsi Aceh, dengan keindahan alam pegunungan dan pantai. Hadirnya beberapa objek wisata, termasuk desa wisata baru didukung dengan adanya investasi modal. Karena terdapat hubungan yang timbal balik antara investasi dan pengembangan kepariwisataan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan membuka serapan tenaga kerja. Penelitian dilakukan secara analisis kualitatif deskriptif, dengan meninjau dan menganalisis potensi pariwisata, tren perkembangan kunjungan wisatawan, dan upaya peningkatan investasi sebagai pendukung pembangunan sektor ekonomi, termasuk bidang pariwisata. Menganalisis data dan fenomena serta beberapa sumber referensi, penelitian mendeskripsikan sejauhmana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Aceh yang sangatlah diperlukan, mengingat pariwisata dalam pembangunan daerah pada garis besarnya menitikberatkan pada segi ekonomis (sumber devisa pajak), sosial (penciptaan lapangan pekerjaan). Tren pariwisata, dan investasi cenderung meningkat seiring dengan jaminan keamanan bagi investor, dan banyaknya minat wisatawan berkunjung ke Aceh. Pemerintah daerah, perlu melakukan strategi dan inovasi kreatif sesuai daerah menerapkan syariat islam. Pengembangan industri pariwisata pun sebagai bagian dari sebuah gejala ekonomi bisnis memerlukan rencana jangka panjang.

1. Pendahuluan

Potensi pariwisata di wilayah ujung Sumatera, yakni Provinsi Aceh dengan keistimewaannya dan daerah modal bagi Indonesia terus berkembang pesat hingga tahun 2026 ini. Dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang menarik perhatian dunia, termasuk dukungan masyarakat daerah yang membuka objek wisata dan desa wisata. Sebagaimana diamati, dua potensi besar dalam sektor agribisnis dan pariwisata yang belum maksimam digarap, baik secara nasional dan daerah secara berkesinambungan.

Dari pantai tropis hingga tradisi lokal yang unik, daerah Aceh melengkapi kekayaan Indonesia secara umum, dengan memiliki banyak daya tarik bagi investor menanamkan modalnya, dan juga untuk wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke daerah Aceh yang sebagian besar masih alami dan asri.

Di tengah tren perjalanan global, pengalaman wisata autentik menjadi salah satu kekuatan terbesar di Aceh dan Indonesia secara umum. Karena salah satu kekuatan utama potensi pariwisata Indonesia adalah kekayaan alamnya yang luar biasa. Dari pantai, gunung, hingga hutan tropis, Indonesia menawarkan keindahan alam yang beragam dan memukau. Keunikan ini membuat Indonesia menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Tidak heran jika wisata alam terus menjadi pilar penting dalam perkembangan pariwisata nasional. Beberapa daya tarik alam Indonesia yang mendukung potensi pariwisata di Indonesia antara lain, sebagaimana ulasan dari artikel di situs <https://stipram.ac.id> menyatakan ada beberapa daya tarik, yakni Keanekaragaman ekosistem laut terbesar dan luas, Garis pantai yang sangat Panjang, Kekayaan taman nasional dan kawasan konservasi, Wisata dapat langsung melakukan petualangan seperti hiking, diving, dan rafting, juga destinasi ekowisata yang cocok dengan selera dan diminati wisatawan global.

Kompas.com merekomendasi lebih 20 Tempat Wisata Alam di Aceh, dari Pantai hingga Air Terjun. Seperti Pantai Lhok Mee Pantai Lhok Mee yang berpasir putih terletak di Desa Lamreh, Masjid Raya, Aceh Besar. Objek wisata ini berjarak sekitar 35 km dari Banda Aceh. Di kota Banda Aceh sendiri, dengan sejumlah objek wisata, khususnya dampak Tsunami, berdiri megah Museum Tsunami, dan beberapa situs Tsunami lainnya. Sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, menyimpan kekayaan alam yang tak kalah memukau dari Bali atau Lombok. Dikenal dengan pantai-pantai yang indah, air terjun, dan pegunungan, Aceh adalah destinasi yang cocok bagi para pelancong yang mencintai alam.

Tak kalah menarik, danau Laut Tawar menjadi magnet bagi wisman dan Wisnu (Domestik) di Aceh. Berada di atas Dataran Tinggi Gayo, serta dapat ditempuh sekitar tujuh jam dari Banda Aceh. Danau Laut Tawar menawarkan beberapa lokasi wisata, salah satunya adalah dermaga kayu di Pantai Menye. Dermaga ini berupa sandaran perahu yang dibangun di tepi Danau Laut Tawar, Takengon, Aceh Tengah. Terkini, banyak wisman langsung menikmati kopi gayo di kebun kopi ataupun di cafe-cafee yang tersebar di pinggiran danau, dan tempat istirahat di homestay ataupun tenda terbuka di alam tanah gayo tersebut.

Masih di sekitar kota Takengon, Aceh Tengah, terdapat objek wisata Buntul Rintis berlokasi di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Objek wisata ini berupa perbukitan yang memiliki beberapa wahana. Pengunjung dapat menemukan spot foto dengan beragam konsep.

Tempo.com juga merekomendasikan objek Air Terjun Pria Laot berlokasi di pelosok Pulau Weh, Sabang, Aceh. Untuk pencinta aktivitas diving dan snorkeling, Pulau Rubiah adalah salah satu tempat wisata Aceh yang dapat dikunjungi. Juga dekat dengan lokasi tersebut, terdapat Goa Sarang dimana objek wisata ini dipenuhi sarang burung walet.

Sedangkan harian detik.com, setidaknya terdapat beberapa objek wisata yang direkomendasi, antara lain Pantai Lampuuk, dengan keunikannya pantai dengan pasir putih dan ombak besar. Objek lain, pantai yang dikenal sebagai surga bagi peselancar ini berada 14,8 km dari Banda Aceh, Bernama pantai Lhoknga. Juga taman rusa Saree, terletak di Saree, Aceh Besar, sekitar 50 km dari Banda Aceh, taman ini menjadi tempat rekreasi keluarga dengan area konservasi rusa. Contoh diatas, selayaknya menjadi semangat baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena masalah krusial yang melanda Aceh, masih dalam hal kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Provinsi Aceh konsisten menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera, dengan angka kemiskinan berada di kisaran 12% hingga 14% dari total penduduknya. Walaupun, saat ini terus menunjukkan penurunan dari kinerja pemerintah Aceh.

Sebagai contoh, Detik.com (25/7/2025) merilis data BPS, penduduk miskin di Aceh turun dari 12,64 persen pada September 2024 menjadi 12,33 persen pada Maret 2025. Jumlah warga miskin saat ini 704,69 ribu orang atau turun dari sebelumnya 718,96 ribu orang.

Mengutip pernyataan Peter F Drucker yang menyebutkan “tidak ada negara miskin, yang ada negara salah urus, maka pengamat social ekonomi politik yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Dr Mohd Heikal dalam dialog di Pro 1 RRI Lhokseumawe, Selasa (21/1/2020) menilai

kondisi di Aceh juga ada kesalahan urus sehingga angka kemiskinan tidak menurun. “Indikator-indikator yang digunakan BPS dalam menentukan kemiskinan dijadikan sebagai fokus utama pembangunan. Penggunaan dana APBA/APBK berorientasi mengurangi angka kemiskinan,” papar Heikal ketika ditanya tentang solusi dalam dialog tentang Pengawasan dan Penggunaan APBK/APBA dalam Menjawab Masalah Kemiskinan di Aceh.

Disamping itu, pengangguran terus menunjukkan jumlah yang signifikan, CNBC Indonesia (6/8/2026) menganalisis dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS edisi Mei 2026, terungkap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbaru di Aceh sebesar 5,89% sedangkan secara nasional sebesar 4,65%, artinya jauh diatas TPT Nasional.

Maka peneliti menganggap, salah satu solusi agar terjadi penyerapan tenaga kerja, perlu dikembangkan industri pariwisata, baik skala kecil yakni desa wisata, hingga skala besar taman wisata atau pulau dan wilayah wisata. Juga mengembangkan SDM pelakunya. Pengembangan SDM bagi suatu negara adalah suatu keniscayaan atau keharusan. Sebab pengembangan SDM adalah investasi negara yang akan menentukan kemajuan bangsa tersebut, kini dan di masa depan. Pengembangan itu dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politik dalam sebuah negara/daerah (Win Konadi *et al.*, 2025).

Potensi pariwisata memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai penelitian menunjukkan sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Riset yang dilakukan Njoya & Seetaram (2017) menyoroti kontribusi pariwisata dalam mengurangi kemiskinan. Analisis keseimbangan umum dinamis menunjukkan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan membantu mengentaskan kemiskinan di daerah pariwisata (Kurniawan *et al.*, 2024).

Selain manfaat ekonomi, pariwisata juga dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat, dengan kedatangan wisatawan memiliki dampak positif pada konsumsi energi, investasi modal, dan emisi CO₂, sementara dampak negatif dari polusi lingkungan dapat mempengaruhi sektor pariwisata (Khan *et al.* (2020).

Banyaknya muncul destinasi dari desa wisata di Aceh juga mendukung dan membuka peluang baru bidang pariwisata. Tren wisata saat ini semakin mengarah pada pengalaman yang dekat dengan kehidupan lokal dan ramah lingkungan. Perkembangan desa wisata di berbagai daerah menjadi alternatif destinasi yang semakin diminati wisatawan. Hal ini membuat potensi pariwisata di Aceh dan Indonesia tidak lagi hanya berpusat di destinasi populer. Desa wisata juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan pariwisata daerah.

Propinsi Aceh, dengan alamnya yang luas terbentang, Sebagian masih asri, merupakan salah satu sektor andalan dalam bidang kepariwisataan. Tetapi dalam kenyataan dilapangan masyarakat kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengembangkan pariwisatanya, termasuk masalah yang urgen modal pengembangan. Hal ini tentu membutuhkan solusi dan strategi yang tepat dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

Potensi pariwisata di daerah Aceh, khususnya di beberapa kabupaten yang banyak destinasi desa wisata, sangatlah besar dan memiliki keberagaman dengan mengutamakan keindahan dan keunikan, serta budaya dan makanan yang khas. Dalam pengembangan pariwisata membutuhkan partisipasi semua komponen antara lain: a) pemerintah, b) swasta, c) masyarakat. Dan pengembangan pariwisata yang optimal membutuhkan dukungan infrastruktur publik yang memadai. Aksesibilitas dan fasilitas yang baik akan memperkuat daya saing destinasi, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi warga lokal (Octivaningsih, *et al.*, 2025).

Desa wisata merupakan salah satu tren wisata dan pilihan alternatif yang saat ini ramai diminati masyarakat untuk sekedar melepaskan stres dan melakukan *refreshing*. DESMA Center (*Destination Management*) sebuah lembaga konsultasi pariwisata mengemukakan bahwa berdasarkan hasil survei online di media sosial pada tahun 2021-2022, bahwa lebih 90% masyarakat domestik dan mancanegara, sangat tertarik untuk melakukan kunjungan ke desa wisata. Oleh karena itu, bentuk kegiatan desa wisata menjadi prioritas pemerintah berinvestasi dan juga yang perkembangannya dilihat konsep *serenity*, *spirituality*, *sustainability* dan kesadaran masyarakat bahwa lingkungan yang ada harus dijaga dan dikelola untuk kelangsungan hidup selanjutnya (Ghani, Nurwanda, Endah, 2025).

Juga kita diingatkan dari beberapa penelitian dan analisis pakar pariwisata, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi pariwisata, antara lain adalah kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan keamanan, infrastruktur transportasi dan akomodasi, serta citra destinasi pariwisata. Temuan Smith, J. (2018), dan Hidayat & Siregar (2016) bahwa kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mendukung investasi pariwisata, seperti insentif fiskal dan regulasi yang mendukung investasi pariwisata, memiliki dampak positif terhadap peningkatan investasi pariwisata di Jakarta.

Dilain pihak, salah satu faktor yang dapat menyebabkan Provinsi Aceh menjadi marjinal adalah risiko bencana alam. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk Aceh yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi (Mangidi *et al.*, 2023; Saputra, 2023), situasi ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi wilayah tersebut, juga meruntuhkan objek wisata yang sudah di investasi.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam analisis ini secara metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan tentang fenomena, atau perilaku, aturan dan kebijakan yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan semua data (fenomena) atau objek penelitian atau situasi objek penelitian, menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini, dan mencoba memberikan solusi untuk masalah, sehingga tetap *up to date*. Informasi yang didapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Yusuf (2014) menyatakan “Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif”.

Juga dengan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan fenomena yang terjadi dengan perkembangan investasi, tren kunjungan wisatawan, objek dan jenis wisata, dan mengenai dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh daerah-daerah marginal dan rentan bencana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dari perspektif berbagai hasil penelitian, pemikiran dan program pemangku kepentingan. Metode ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk data BPS, Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Aceh, CNBC Indonesia, juga hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, serta riset akademisi pada jurnal nasional dan internasional.

Jadi pada dasarnya penelitian kualitatif diartikan dan difahami suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (Marwan, *et al.*, 2023)

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada dua masalah pokok sesuai judul penelitian yang diangkat, yakni perkembangan dan beberapa data tentang wisatawan dan objek wisata di Aceh, dan dikaitkan dengan dukungan investasi, serta upaya dan faktor yang disarankan dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

A). Kondisi Realisasi Investasi Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Aceh dan BPS Aceh mendeskripsikan, data tahun 2022, tergambar realisasi investasi Aceh baru mencapai 4.551.811 USD ribu. Dilengkapi dengan tahun 2024-2026, ada kecenderungan meningkat (Tabel 1). Dimana pada tahun 2024, nilai realisasi investasi sebesar 9,47 Triliun, namun ada penurunan di 2025 sebesar minus 4,96% menjadi 9 Triliun. Dengan asumsi optimis, di tahun 2026 angka investasi meningkat positif. Data yang tersedia pada dua triwulan pertama, sudah menunjukkan nilai investasi 3,06 Triliun dan kondisi tersebut masih dalam rehabilitasi pasca bencana *hidrometeorologi*.

Terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (*debt*) dimana pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah secara bilateral maupun multilateral. Kedua adalah penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dimana FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara, berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, joint ventura. Dan ketiga, investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal (Didit & Indah, 2005; dalam Zaenuddin, 2009).

Tabel 1. Nilai Realisasi Investasi di Aceh Tahun 2024-2026



Studi Khasanah & Kurniawan (2005) secara khusus menganalisis faktor-faktor penentu investasi asing langsung, dengan kasus memilih lokasi industri manufaktur di tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Faktor-faktor penentu tersebut adalah faktor tenaga kerja, faktor pasar, faktor efek aglomerasi, infrastruktur, waktu dan heterogenitas regional. Penelitian, menunjukkan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan lokasi FDI adalah variabel dummy metropolitan, perpajakan, dana kredit domestik, dan *market size* serta faktor ketersediaan tenaga kerja. Namun faktor yang berhubungan dengan pasar menjadi faktor utama bagi FDI untuk menentukan lokasinya (*market seeker*).

Sementara itu penelitian Shaukat Ali dan Wei Guo (2005) menggunakan metode survei terhadap 22 industri di China. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keputusan investor yakni *market size*, *growth*, nilai tukar, pengembalian investasi, kebijakan insentif pemerintah, stabilitas politik, strategi global dari perusahaan, ekspor, teknologi & infrastruktur. Sedangkan kendala teknis, menurut pengakuan dan yang di keluhkan oleh para investor, baik dari dalam negeri maupun asing adalah kurangnya kepastian hukum bagi para investor sehingga ini dapat mengurangi minat Investasi di Aceh.

Pengamat Sosial Politik dan Mahasiswi FISIP USK, Fiqih Ramadhani Mukhti, dalam kolom media serambiNews.com (7/5/2024), menulis bahwa sebagai daerah otonomi khusus mempunyai peraturan daerah khusus yang mengatur perihal aturan investasi, baik yang berupa PMDN, dan PMA. Yang dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2013 memungkinkan dilakukan percepatan, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Termasuk dalam Qanun tersebut, mewujudkan percepatan penanaman modal di Aceh juga berupaya menciptakan iklim investasi yang baik, demi mempercepat pertumbuhan Investasi di Aceh.

Namun, nyatanya adanya terjadi perlambatan, malah jalan di tempat. Berdasarkan paparan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh, dalam Laporan Hambatan Penanaman Modal, 2023, disebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya penyerapan investasi itu, seperti regulasi yang berbelit, akuisisi yang berbelit, ketersediaan infrastruktur yang belum merata, adanya insentif non fiskal lain yang tidak mendukung serta kurangnya Sumber Daya Manusia, dalam hal ini pekerja terampil yang belum memadai di Aceh.

Maka saran dalam artikel di media SerambiNews.com tersebut, salah satu cara untuk meningkatkan investasi di Aceh, pemerintah harus memberi kemudahan berinvestasi. Investasi tersebut mesti disesuaikan dengan potensi sumber daya setempat dan juga tata sosial masyarakat Aceh yang menerapkan aturan Syariat Islam, serta memberikan keamanan dengan adanya kejelasan hukum bagi para investor.

b). Tren Kepariwisata di Aceh

Dua sektor yang memiliki potensi besar di Aceh adalah agribisnis, dan pariwisata. Dan keduanya dapat dikombinasikan sebagai wisata agro atau agrowisata. Pengembangan sektor Agrowisata melalui jasa wisata dan pemasaran produk pertanian yang lebih baik, sangat mungkin dilakukan di Provinsi Aceh, contohnya di dataran tinggi gayo (meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah), yang dikenal dengan keindahan alamnya, juga terdapat sejumlah objek wisata alam dan situs sejarah, serta hasil pertanian kopi, kentang, alpukat, cabai dan sejenisnya yang dapat dieksplor untuk menjadi daya tarik wisatawan.

Meningkatnya angka perjalanan dan pengeluaran oleh wisatawan, baik mancanegara dan nusantara (domestik) juga karena dukungan adanya keanekaragaman budaya, sehingga sangat potensial dalam berbagai aktivitas wisata. Termasuk, salah satu jenis wisata agro atau agrowisata.

Namun, kedua sektor ini masih belum dikembangkan secara maksimal. Maka dalam diskusinya DPMPTSP Aceh pernah memberi rekomendasi, untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar Aceh tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kedua, meningkatkan infrastruktur dan promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara.

Terkait dengan objek wisata, yang biasanya menjadi sasaran kunjungan Wisman dan Wisnun adalah keindahan alam Aceh, seperti Sabang di Pulau Weh, Dataran Tinggi Gayo, keindahan pantai-pantai di seluruh Aceh, terutama di wilayah Barat-Selatan, serta warisan sejarah dan budaya Islamnya, menjadikannya destinasi wisata potensial. Investasi dalam pariwisata berbasis komunitas seperti penyediaan resor, ekowisata, serta pengembangan destinasi *halal tourism* dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan internasional. Penguatan kerja sama dengan Sumatra Utara sebagai wilayah terdekat dalam sektor pariwisata dapat membuka jalur wisata gabungan antara Medan, Danau Toba, dan destinasi-destinasi wisata di Aceh.

Pariwisata kini dianggap sebagai kebutuhan manusia modern dan menjadi sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) untuk pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan (Frasawi & Citra, 2018 dalam Ghani, Nurwanda, Endah, 2025). UNWTO mengemukakan bahwa 1 dari 7 orang penduduk di dunia melakukan wisata ke luar batas negara asalnya. Proyeksi tersebut akan terus meningkat 10.3 % pada tahun 2030 (Ghani, Nurwanda, Endah, 2025).

Organization for Economic Cooperation and Development menyatakan bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pariwisata yang semula pariwisata massal (*mass tourism*) ke bentuk pariwisata alternatif (*alternative tourism*), yakni wisata yang berfokus pada aspek alam dan budaya dengan jumlah wisatawan sedikit atau kelompok kecil (Lestari *et al.*, 2016).

Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru dan mempunyai pengalaman wisata yang berkualitas dengan terlibat langsung dalam kegiatan berwisata menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap wisata alternatif (*alternative tourism*). Salah satu bentuk adalah Wisata Pedesaan (*rural tourism*). Wisata Pedesaan merupakan konsep wisata yang memanfaatkan sumber daya yang ada pada satu atau beberapa desa. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dapat berupa tradisi atau budaya yang ada di masyarakat (Maryani, 2019).

Tabel 2. Wisatawan Mancanegara Yang Mengunjungi Aceh 2024-2025

No.	Kategori	2024				2025											
		Des	Jan 2025	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dek	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Malaysia	2,700	28,875	2,829	3,001	818	1,306	3,319	2,411	2,806	3,216	4,471	3,286	2,874	3,273	33,679	
2	Selanda Baru	8	52	8	2	6	4	1	2	2	11	6	3	8	5	58	
3	Perancis	77	395	34	27	18	26	29	22	90	82	20	22	26	18	383	
4	Jerman	31	341	48	46	31	35	35	29	38	39	42	28	23	39	407	
5	Australia	48	483	52	29	64	28	33	25	27	23	21	25	27	212	588	
6	Selanda	18	185	17	17	14	18	6	12	95	36	30	16	13	11	291	
7	Amerika Serikat	26	330	64	16	19	25	7	19	25	11	21	19	30	80	348	
8	Singapura	80	877	44	39	29	27	28	173	75	67	41	44	66	64	716	
9	Inggris	27	375	43	17	33	19	17	16	84	34	23	28	16	263	563	
10	Thailand	27	313	9	24	30	36	52	10	21	36	11	42	32	19	391	
11	Lainnya	622	5,458	545	578	1,039	651	484	900	896	763	706	738	721	824	8,923	
12	Jumlah	3,799	34,907	3,882	3,845	2,192	2,264	4,895	3,817	4,114	4,314	5,483	4,357	3,832	4,886	48,325	

Sumber data: BPS Aceh, Disbudpar Aceh, DPMPTSP Aceh

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnun) ke Aceh, baik dalam rangka tujuan bisnis sambil berekreasi, ataupun acara resmi sambil ber-rekreasi, serta tujuan utama ber-rekreasi kea lam terbuka Aceh, selama tahun 2024 terdapat 34.097 wisatawan mancanegara dan 12.926.860 wisatawan nusantara (domestik) mengunjungi Aceh. Dari mancanegara, tercatat terbanyak dari Malaysia sejumlah 25.875 wisatawan, lalu Australia 430 orang.

Pada Januari 2025 terdapat 3.892 wisatawan, sedangkan April 2025 menurun hanya ada 2.204, namun di Desember 2025 meningkat mencapai 4.836 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 33,15 persen bila dibandingkan wisman yang datang pada November 2025 yang berjumlah 3.632 kunjungan. Secara total tahun 2025 ada sejumlah 46.325 wisman, dan 7.272.914 wisnun, hal ini menunjukkan ada kenaikan wisman lebih dari 35,5%, dimana juga didominasi wisatawan dari Malaysia (Tabel 2).

Kemudian data terakhir 2026, misalnya pada Januari 2026 ada sejumlah 3666, lalu April 2026 jumlah wisman yang berkunjung 3.080, pada bulan ini naik 39,75 persen bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2025 (2.204 kunjungan Wisman). Selama Januari hingga Juni 2026 sudah ada sejumlah 17847 kunjungan Wisman di Aceh.

Diperkirakan tahun 2026 akan terjadi lonjakan yang signifikan. Hal ini ada kaitan juga dengan hadirnya beberapa objek wisata alam (pegunungan) dan pantai, termasuk desa wisata. Juga tak terelakkan karena wisatawan juga ingin melihat langsung dampak bencana *hidrometeorologi*, atau banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi 26 November 2025 lalu.

BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh dilakukan melalui dua pintu masuk utama, yakni Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Internasional Sabang. Selama periode Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisman mencapai 12.146 kunjungan, atau meningkat 0,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 12.133 kunjungan. Malaysia masih mendominasi jumlah wisman yang datang ke Aceh yakni sebesar 58,12 persen dari total wisman.

Selain mencatat peningkatan kunjungan wisatawan asing, BPS juga melaporkan adanya perbaikan pada tingkat hunian hotel berbintang di Aceh. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada April 2026 mencapai 24,35 persen, meningkat 4,56 poin persentase dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 19,79 persen. Dibandingkan April 2025, TPK hotel bintang juga naik 1,75 poin persentase dari 22,60 persen.

Sementara itu, TPK hotel nonbintang dan akomodasi lainnya pada April 2026 tercatat 19,44 persen, meningkat 2,34 poin persentase dibandingkan Maret 2026. Namun, jika dibandingkan April tahun lalu, tingkat hunian hotel nonbintang turun 1,50 poin persentase.

Juga data BPS menyatakan rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang 2 - 3 malam, lebih lama dari pada wisatawan domestik atau nusantara, yang rata-rata 1-2 malam.

Jumlah wisatawan Mancanegara sangat jauh berbeda dengan wisatawan nusantara, seperti ditunjukkan dalam data table 3. Memang wisatawan asing, baik dari Asia, Eropa dan Amerika yang berkunjung ke Aceh, berfluktuasi, namun wisatawan nusantara stabil dan trennya meningkat.

Tabel 3. Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) selama 2020-2026

Tahun	Mancanegara	Nusantara (Domestik)	Total
2020	21322	1336163	1357485
2021	1748	1458238	1459986
2022	5752	6951454	6957206
2023	29828	8943806	8973634
2024	34097	12926860	12960957
2025	46325	7272914	7319239
2026	17847	10746027	10763874

Catatan: 2026 tercatat hingga bulan Juni

Khusus untuk wisatawan asing (mancanegara), Disbudpar Aceh menyatakan ada tren peningkatan, dimana peningkatan kunjungan tersebut tidak terlepas dari langkah strategis Pemerintah Aceh dalam memperkuat daya tarik destinasi dan memperluas konektivitas wisata.

Untuk itu, Disbudpar Aceh bersama *InJourney* dan sejumlah mitra strategis menggelar pertemuan *Culture and Destination Development* (CDD) pada tahun 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pengembangan pariwisata Aceh melalui kerja sama lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Dimana Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, asosiasi pariwisata, dan pelaku usaha. Branding “*The Light of Aceh*” juga terus diperkuat dengan menonjolkan potensi wisata religi, sejarah, kuliner, bahari, dan budaya, serta mengintegrasikan promosi dengan kampanye nasional Kementerian Pariwisata dan *InJourney* untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama negara-negara prioritas seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Selain memperkuat aksesibilitas dan promosi, Pemerintah Aceh melalui Disbudpar juga terus memperkaya atraksi wisata, yang terangkum dalam program Khazanah Piasan Nanggroe 2025. Agenda tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota dan menjadi kalender event unggulan Aceh. Beragam festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan ekonomi kreatif dihadirkan secara kolaboratif untuk menarik minat wisatawan dan memberikan pengalaman khas Aceh yang berkesan.

Dibandingkan dengan kunjungan yang lebih ke Sumatera Utara, sebagai provinsi tetangga, dimana data BPS membuka tabir, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2024 tercatat sebesar 250.413 kunjungan (naik 26,32% dari 2023), dan meningkat 16,80% pada tahun 2025 menjadi 292.481 kunjungan. Maka, penting bagi Aceh untuk belajar dari keberhasilan Sumatera Utara dalam meningkatkan dan pengembangan industri pariwisata, dan realisasi investasi pariwisata. Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan dan konsisten dalam menarik investasi pariwisata, terutama melalui peningkatan infrastruktur, kebijakan yang mendukung bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi industri dan pariwisata.

Aceh, dengan memanfaatkan pembelajaran ini, dapat mengadaptasi, menyesuaikan, dan menerapkan strategi serta kebijakan investasi baru. Selain itu, Aceh sebagai tanah pejuang yang pantang menyerah, yang mampu bernegosiasi dengan mancanegara, dapat mengeksplorasi peluang kerjasama antar-regional dan dunia internasional, seperti pengembangan sumber daya (alam dan manusia) dan transfer pengetahuan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi provinsi ini.

Akan nampak dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal, dan Cohen (1984, dalam Arliman S., 2018) menjadi delapan kelompok besar, yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan control, (7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Daerah yang memiliki alam dan pemandangan alam yang indah, didukung dengan perkembangan agribisnis, dan juga dukungan investor, sangat menyokong bagi berkembangnya sektor industri pariwisata.

Dalam Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mendeskripsikan program prioritas utama perkembangan pariwisata di Aceh adalah mewujudkan destinasi wisata ramah muslim (wisata halal) bertaraf internasional yang berbasis pada nilai-nilai syariah, budaya, dan kearifan lokal. Untuk itu dipedomani, pada empat pilar utama pengembangan, yakni; Atraksi (*Attraction*): Menambah jumlah objek daya tarik wisata unggulan, situs cagar budaya, serta event kreatif dan bahari. Aksesibilitas (*Accessibility*) dengan memperbaiki jalur transportasi dan kemudahan akses menuju lokasi wisata daerah. Fasilitas (*Amenities*), dengan melengkapi sarana pendukung seperti akomodasi, tempat ibadah yang nyaman, dan kuliner halal. Dan layanan pendukung (*Ancillary*), dengan memperkuat regulasi, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang sadar wisata.

Dengan strategi pendukungnya, antara lain mempercepat sertifikasi halal pada produk kuliner, hotel, dan biro perjalanan wisata. Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan menyelaraskan kebijakan daerah untuk mendongkrak produk lokal dan desa wisata. Serta Promosi Digital, yaitu memasifkan pemasaran pariwisata Aceh melalui platform digital guna menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

c). Hubungan Teoritis – Empiris Investasi dan Kepariwisata

Hubungan antara investasi dan perkembangan pariwisata, termasuk wisata agro dengan memanfaatkan sektor agribisnis yang mumpuni, bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Investasi menjadi modal utama untuk membangun fasilitas dan infrastruktur, sementara pariwisata yang berkembang pesat akan

menarik lebih banyak penanaman modal baru karena menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi, dan penyerapan tenaga kerja

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata saat ini, sudah mulai nampak, dengan ditandai pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan jalan Tol, yang saat ini sudah sampai dari Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) sepanjang 74,2 km. Lalu rencana semula pembangunan rel kereta api sebagai moda transportasi yang dapat memperlancar perjalanan wisatawan, serta pemberian pinjaman dan dimudahkannya pemberian izin di dalam berinvestasi di Aceh.

Juga bicara tentang agrowisata, yang sangat mungkin dikembangkan, karena Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, terutama untuk komoditas pertanian dan perkebunan unggulan seperti kopi, kakao, nilam, serih wangi, sawit, hasil hutan non-kayu, serta hasil perikanan. Hilirisasi pertanian perlu menjadi fokus utama, dengan peluang investasi dalam pengolahan kopi, aneka minyak atsiri (*essential oils*), pabrik minyak kelapa sawit berkelanjutan, serta industri pengolahan hasil laut. Untuk itu diperlukan penguatan rantai pasok agro-industri dan agro-wisata yang dapat dilakukan melalui konektivitas yang lebih baik dengan Sumatra Utara, Thailand Selatan, dan Malaysia Utara sebagai pusat distribusi.

Sebagaimana dirangkai dalam laporan analisis wilayah investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP), Aceh memiliki potensi besar di sektor energi hijau, terutama dalam geotermal, tenaga air, surya, dan tenaga angin, dan bioenergi. Investasi dalam pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air dapat menjadi solusi untuk mendukung kawasan industri serta meningkatkan akses energi bagi masyarakat. Dengan insentif yang tepat, Aceh bisa menjadi pusat energi hijau yang mendukung keberlanjutan di koridor investasi barat Indonesia.

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Menurut Tambunan (2006) terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah (Zaenuddin, 2009).

Beberapa studi menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan investasi. Laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi, mengatakan terdapat paling tidak ada empat faktor terpenting dalam menarik investasi, antara lain stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi. Studi lainnya yakni survei WEF (2007) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi pengusaha di Indonesia berturut-turut adalah masalah infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, akses dana terbatas, kebijakan yang tidak stabil, dan perpajakan.

Dari sisi manajemen dan ekonomi pembangunan, secara substansi dan hasil survei bahwa iklim investasi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Keadaan sumber daya manusia (SDM); (2) Dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar, yang secara umum menyangkut masalah keamanan dan kenyamanan; (3) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur; (4) Regulasi dan administrasi pemerintah; (5) Ketersediaan bahan baku lokal; dan (6) Kondisi pasar.

Kondisi dari faktor tersebut, juga terjadi di provinsi Aceh. Akibat konflik yang berkepanjangan di tambah beberapa bencana skala besar yang terjadi, masalah investasi dan perkembangan bidang kepariwisata masih lemah.

Analisis dan rekomendasi Kementerian Investasi/BKPM (2023), juga memberikan solusi agar dilakukan analisis yang tepat, akurat, strategis dan relevan dengan pengembangan sumber daya Aceh ini harus jitu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh. Dengan harapan menjadi dasar perumusan strategi dan kebijakan investasi yang dapat menciptakan lingkungan bisnis dan pengembangan wilayah ke bidang pariwisata yang lebih menarik di Aceh. Hal ini termasuk harmonisasi peraturan, insentif investasi, dan inisiatif dan tekad yang moderat untuk menarik investor. Pendekatan ini bisa mengurangi birokrasi dan menghilangkan hambatan investasi, yang sering kali menjadi tantangan para calon investor, untuk merealisasikan rencana investasinya di Aceh, juga tersediannya objek wisata dan keamanan bagi wisatawan berkunjung ke Aceh.

Mariah S.M. Purba (2015) menyatakan untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor.

Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus, memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik investasi dan menerbitkan izin yang berkaitan dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, maupun kegiatan ekspor-impor, dengan tetap memperhatikan norma, standar, dan prosedur nasional yang berlaku.

Implementasinya atau dalam pelaksanaannya diatur pada aturan lokal, yakni Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Investor asing dapat menanamkan modalnya di Aceh secara berkala, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan (Qanun) dan adat/kebiasaan setempat. Peraturan ini memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Tinggal, bagaimana dilakukan regulasi atau negosiasi terhadap masih berlakunya Undang-Undang Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing, khususnya yang mengatur bahwa penanaman modal asing, termasuk penanaman modal yang memanfaatkan modal asing dari negara lain, bergantung pada perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan pemerintah negara lain. Menurut undang-undang ini hanya pemerintah pusat yang berwenang untuk menarik investor asing dari negara lain dalam hal penanaman modal asing.

Kemudian, hal yang harus diterjemahkan lebih lanjut dan jelas tentang, hal ini tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Salah satunya adalah tentang asas ke-Islaman dalam penanaman modal di Aceh, dimana penanam modal di Aceh harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai ke-Islaman.

Keberadaan Aceh sebagai daerah paling ujung barat Indonesia dengan kedudukan yang strategis membuat Aceh dikenal dalam lingkungan internasional. Aceh juga dikenal sebagai daerah pelabuhan/bandar wisata yang bernuansa Islami, dimana komunitas penduduknya mayoritas beragama Islam. Selain itu juga Aceh telah menerapkan syariat Islam dan menjadi landasan dalam melakukan setiap perbuatan dan juga hubungan hukum (Bantasyam & Siddiq, 2019).

4. Simpulan

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan penyerapan tenaga kerja sehingga keluar dari Krisis kemiskinan dan pengangguran, salah satu solusinya dengan mengembangkan sector atau bidang pariwisata.

Mengingat Aceh salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam, sejarah, dan beragam budaya dari 23 kabupaten/kota yang saat ini dimiliki. Akan menuntun datangnya wisatawan mancanegara dan nusantara. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat Aceh yang terkenal islamis dengan diberlakukannya syariat, harus mampu menumbuhkan rasa aman dan nyaman, sehingga investor dan wisatawan mendapat jaminan beraktivitas di Aceh.

Karena, seperti ungkapan Johannes C. Jordaan, bahwa “Wilayah yang tidak berpartisipasi dalam proses globalisasi, atau mereka yang kebijakannya buruk atau tidak memadai dibandingkan wilayah yang maju atau sedang berkembang, mempunyai risiko menjadi kurang kompetitif secara komparatif dalam ekonomi global”.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, mengurangi pengangguran, dan menghidupkan kuliner serta UMKM dalam rangka usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi Arliman, (2016).

Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Maka untuk pengembangan pariwisata tentu akan memerlukan pembangunan infrastruktur agar wisatawan lebih banyak yang datang ke daerah destinasi wisata (Sanusi, 2018).

Dalam hal ini, tentunya perlu dikembangkan iklim investasi, sehingga pembangunan bidang pariwisata dan bidang lainnya tersebut dapat dijalankan pemerintah. Investasi dapat berbentuk penanaman modal asing dan anggaran daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk: (a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran; (b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional; (c) Menyiapkan tenaga kerja; (d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan; (e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial; dan (f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiskal.

Daftar Pustaka

- Ali, Shaikat & Guo, Wei (2005). Determinant of FDI in China, *Journal of Global Business and Technology*, Volume 1, Number 2.
- A. Muri Yusuf (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group
- Arum Rakhmasari Octivaningsih, et al (2025). Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif Terpadu Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4(1), 6885-6894. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2883>
- Hidayat, A., & Siregar, M. (2016). Tourism Investment and Its Impact on Economic Development in Jakarta Special Capital Region. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(5), 45-53.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). Prospek Investasi di Sumatera Utara dan Aceh: Tren 2023-2024. Jakarta: Kementerian Investasi RI. Retrieved from [<https://www.investindonesia.go.id>]
- Khan, A., Bibi, S., Ardito, L., Lyu, J., Hayat, H., & Arif, A. (2020). Revisiting the dynamics of tourism, economic growth, and environmental pollutants in the emerging economies—sustainable tourism policy implications. *Sustainability*, 12(6), 2533. <https://doi.org/10.3390/su12062533>
- Khasanah, Uswatun & Kurniawan, A. B. (2005). Determinan Investasi Asing dalam Memilih Lokasi dan Polarisasi Industri Manufaktur di Pulau Jawa, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2.
- Laurensius Arliman S (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, *Jurnal Arena Hukum*, 9(1), 92.
- Laurensius Arliman S (2018). *Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20(2), 273-294
- Lestari, A. A. (2022). Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Dan Kepuasan Wisatawan Terhadap Minat Berkunjung Kembali (Study kasus pada Objek Wisata Budaya Taman Tujuh Desa Hiang Sakti). *Jurnal Administrasi Kantor*, 10(2), 153–166.
- Mangidi, U., Mandaya, I., & Ngii, E. (2023). Utilization of sentinel 1 sar for flood mapping in north konawe regency, southeast sulawesi province, indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1134(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1134/1/012019>
- Mariah S.M. Purba (2015). Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Marwan, Win Konadi, Alfi Syahrin, Kamaruddin, Rahmat (2023). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method dilengkapi analisis data dengan SPSS*, Banda Aceh: Bandar Publishing. ISBN: 978-623-449-205-7
- Maryani, E. (2019). Geografi Pariwisata. Penerbit Ombak.
- Naufal Shofi Setia Al - Ghani, Asep Nurwanda, Kiki Endah (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jojogan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Sains Student Research Kampus Akademik Publisng* 3(5), 827-833 E-ISSN: 3025-9851; P-ISSN: 3025-986x, doi: <https://doi.org/10.61722/Jssr.V3i5.5798>
- Njoya, E. and Seetaram, N. (2017). Tourism contribution to poverty alleviation in kenya: a dynamic computable general equilibrium analysis. *Journal of Travel Research*, 57(4), 513-524. <https://doi.org/10.1177/0047287517700317>

- Ramdhan Kurniawan, Faridah Iriani, Minrohayati (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Marginal di Indonesia, *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, Volume 5, Number 2 (June) 2024 Available at <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/index> p-ISSN: 2722-3744 e-ISSN: 2776-0278
- Saifuddin Bantasyam, Muhammad Siddiq (2019). *Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre
- Sanusi (2018). Rayuan Investasi Wisata Di Sumatera Barat, lihat dalam: <http://lifestyle.kontan.co.id/news/rayuan-investasi-wisata-di-sumatera-barat>
- Saputra, A. N., Nikmah, Fitria, R. W., Nathania, W., Misna, K. A., & Ariyadi (2023). Analysis of flood inundation mapping using the weighting method in urban floods. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1276(1), 012026. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1276/1/012026>
- Smith, J. (2018). The impact of tourism investment on economic growth: Evidence from Jakarta. *Journal of Tourism Economics*, 20(2), 123-140.
- WEF (2007). *The Global Competitiveness Report 2005-2006*, Geneva: World Economic Forum.
- Win Konadi, Musrizal, Azhari, Kamaruddin, Rahmad (2025). *Penduduk & Pembangunan (Analisis Demografis dan Empiris)*, Cetakan ke-1, Medan; Penerbit CV. Merdeka Kreasi
- Zaenuddin (2009). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi PMA di Batam, *JEJAK*, Volume 2, Nomor 2, hal.156 – 166.